

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Amru, Alba dan Rudi Kurniawan. 2019. *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*. Lhoksemawe: Unimal Press.
- Abidin, Andi Zainal. 2018. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Arif, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip..
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Pengajaran Secara Manual*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- _____. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Cet. 2*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, Ismu Gunadi dan Jonaedi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartanti, Evi 2016. *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2005. *Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia*. Yogyakarta: Prenada Kencana.
- Kristiana, Yudi. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Thafa Media.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 85.

- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*. Jakarta: Renika Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nazuli, Ahmad Shofin. 2014. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- R, Dita Angga. 2020. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Intenasional*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Metodos)*, Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tomalili, Rahmanuddin 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*. Jakarta: UI Press.
- Yurizal. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Malang: Media Nusantara Creative.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 1 angka 15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 1 angka 16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 22 ayat 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 26 ayat 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 26 ayat 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 26 ayat 3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, 23A ayat 2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, 23A ayat 3

Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1 angka 16.

Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1).

Perpres No. 9 Tahun 2005 tentang Kemenko PMK, Pasal 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 38 ayat 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 38 ayat 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 38 ayat 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 38 ayat 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 36 Tahun 2012 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1 angka 16.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Berih dan Bebas dari KKN.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemeirntah Daerah, Pasal 192.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 54.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Pasal 122.

Permensos No. 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Pasal 133.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal

Alfedo, Juan Maulana dan Rama Halim Nur Azmi. 2020. "Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan," *Jurnal Antikorupsi*. 6 (2), 286.

Alfiyah, Ninik. 2021 "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19," *Jurnal Education and Ddevelopment*, 9 (2), 381.

Dewi, A.A Sagung Laksmi dan Luh Putu Suryani. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pada Kegiatan Bantuan Sosial Covid 19", *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (3), 426.

Lokbere, Darson. *et.al.* 2021. "Petanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pada Kegiatan Bantuan Sosial Covid-19," *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3), 303.

Oktarina, Evi dan Putri Sari Nilam. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial," Seminar Nasional Mewujudkan Madani dan Lestari seri 9 "Pemukiman Cerdas dan Tanggap Bencana," 24 (10), 69-70.

Sugiarto, Totok. 2013. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18 (1). 190.

Susilo, Adityo. 2020. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. 7 (1), 45-46.

D. Skripsi

Nikita, Yarni Ahmady. 2018. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks.). Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Yanti, Silvia Dwi., 2021. "Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.